

PERAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN PEDESAAN DI KELURAHAN GUDANG HIRANG KECAMATAN SUNGAI TABUK

Devia Hetty Hernany¹, Amelia Puspita², Normajatun³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

email: deviahetty87@gmail.com

Abstrak

Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian penting dari perwujudan pembangunan otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan keikutsertaan masyarakat desa dengan membuat program-program nasional yang salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat desa. Seperti yang kita ketahui, masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang identik dengan kemiskinan dan keterleatar belakangan padahal tidak sedikit potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa. Upaya penanggulangan kemiskinan yang paling strategis dalam era otonomi daerah dapat dirumuskan dalam satu kalimat yaitu "berikan peluang kepada keluarga miskin dan komunitasnya untuk mengatasi masalah mereka secara mandiri". Ini berarti pihak luar harus mereposisi peran mereka, dari agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan. Input yang berasal dari luar yang masuk dalam proses pemberdayaan harus mengacu sepenuhnya pada kebutuhan dan desain aksi yang dibuat oleh keluarga miskin itu sendiri bersama komunitasnya melalui proses dialog yang produktif agar sesuai dengan konteks setempat. Artinya program pemberdayaan masyarakat desa adalah program yang sangat mementingkan kebutuhan masyarakat pedesaan.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Otonomi Daerah, Masyarakat Pedesaan

Abstract

Rural community development is an important part of the realization of regional autonomy development in the context of equitable development and community welfare. One of the efforts made by the government is to increase the participation of rural communities by creating national programs, one of which is the village community empowerment program. As we know, rural communities are communities that are synonymous with poverty and deprivation, even though there is a lot of potential owned by rural communities. The most strategic poverty reduction efforts in the era of regional autonomy can be formulated in one sentence, namely "provide opportunities for poor families and their communities to overcome their problems independently". This means that outsiders must reposition their role, from empowerment agents to empowerment facilitators. External inputs that enter the empowerment process must fully refer to the needs and action designs made by the poor families themselves and their communities through a productive dialog process to fit the local context. This means that the village community empowerment program is a program that is very concerned with the needs of rural communities.

Keywords: Empowerment, Regional Autonomy, Rural Communities

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa, mengingat konsentrasi jumlah penduduk masih dominan berada di daerah desa, sehingga desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini lebih bersifat "top down" dibandingkan "bottom-up", sehingga telah menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan semata, bukan sebagai subjek pembangunan.

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diberi keleluasaan untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan, keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. UU ini sebagai landasan hukum bagi tiap daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Masyarakat diberi peran yang lebih besar dalam pembangunan daerah. Selain itu masyarakat dituntut berkegiatan dan berinovasi dalam mengelola potensi daerah serta memprakarsai pembangunan daerah. Sejalan dengan perkembangan kemampuan rakyat dalam pembangunan dan berkurangnya campur tangan pemerintah pusat terhadap daerah, maka pembangunan seharusnya diarahkan untuk merubah kehidupan rakyat menjadi lebih baik.

Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya merupakan usaha untuk memberdayakan rakyat sehingga mereka mempunyai akses terhadap sumber-sumber ekonomi.

Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Berbagai usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk. Namun sekarang ini pembangunan di tingkat desa masih jauh dari harapan karena lambannya pembangunan yang terjadi di tingkat desa tersebut. Kondisi ini terjadi bisa saja karena jauhnya jangkauan menuju desa tersebut ataupun sulitnya akses menuju desa tersebut.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas. Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan bisa melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar.

Upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia telah dilakukan sejak awal kemerdekaan. Misalnya, di bidang pendidikan, pemerintah melancarkan pemberantasan buta huruf tak terbatas di sekolah formal saja, namun juga secara non-formal. Di era Bung Karno, anak-anak usia sekolah bahkan "dikejar" agar mau masuk sekolah. Di era Pak Harto, dicanangkan wajib belajar sembilan tahun, dan hasilnya luar biasa.

Di bidang kesehatan, pemerintah meluncurkan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memperkenalkan sistem santunan sosial. Di era Orde Baru, sejak 1970-an, dikenalkan pusat pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan (Puskesmas) agar lebih mudah terjangkau oleh masyarakat desa. Belakangan dibentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap desa. Pada awal 1990-an pembangunan pusat kesehatan masyarakat meningkat lebih tinggi daripada rumah sakit. Penempatan bidan di desa yang mendidik kader-kader dari kalangan penduduk desa sendiri, dan mendampingi kader dalam kegiatan rutin posyandu, menunjukkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.

Melalui program transmigrasi, penduduk miskin dari daerah padat diberi peluang yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Pembukaan dan pengembangan tanah pertanian baru diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja para transmigran.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan pula diluncurkan berbagai Inpres, seperti Inpres Kesehatan, Inpres Perhubungan, Inpres Pasar, Bangdes, dan yang agak belakangan namun cukup terkenal adalah Inpres Desa Tertinggal (IDT). Dapat dicatat juga program-program pemberdayaan lainnya mulai dari era orde baru sampai era reformasi seperti Program Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Takesra- Kukesra), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), bahkan pengembangan program pemberdayaan masyarakat selanjutnya adalah PNPM-Mandiri, KAT, PANSIMAS dan seterusnya.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat semata-mata bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat pedesaan dan mengeluarkan masyarakat Indonesia dari belenggu kemiskinan dan ketidakberdayaan

METODE

Adapun metode yang digunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan alur sebagai berikut:



Gambar 1. penelitian kualitatif

1. **Perencanaan**
Perencanaan merupakan proses awal dalam suatu manajemen yang akan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap proses-proses manajemen berikutnya. Jika sejak awal manajer telah melakukan perencanaan dengan tepat, maka proses-proses berikutnya akan berjalan dengan baik dan tujuan organisasi yang dicapai juga akan maksimal. Menurut Wijayanto (2012:75) mendefinisikan, “Perencanaan (planning) merupakan proses menetapkan tujuan dan memilih cara untuk merealisasikan tujuan tersebut. Setiap organisasi tidak dapat lepas dari proses perencanaan”.
2. **Pengorganisasian**
Setelah perencanaan dilakukan dengan baik, maka tahap berikutnya yang harus dilakukan dalam proses manajemen yaitu pengorganisaasian. Malayu Hasibuan (2007: 118-119) menyatakan “Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut.
3. **Pelaksanaan**
Pelaksanaan menurut Siagian dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan. Sedangkan menurut G.R Terry dalam Sukarna, memberi definisi pelaksanaan ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan
4. **Monitoring dan Evaluasi**
Tujuan monev menurut Suharto adalah untuk mengetahui apakah program yang telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mengetahui saran yang baik untuk digunakan. Sedangkan tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana program sudah tercapai dan akibat atau dampak yang ditimbulkan dari program yang telah dilakukan (Suharto, 2010).
5. **Laporan akhir**
Dalam laporan akhir, dilaporkan tentang kemajuan kegiatan, output dan outcome kegiatan, kendala yang dialami serta cara-cara yang ditempuh untuk mengatasinya juga disampaikan. Pengalaman dalam melaksanakan setiap kegiatan serta capaian yang diperoleh, diharapkan, dilengkapi dengan analisa mendalam

HASIL DANPEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan secara offline dengan terjun langsung ke lapangan dengan beberapa tahapan pelaksanaan. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada hari senin tanggal 25 September 2023 diawali dengan berdiskusi Bersama Lembaga RT mengenai kegiatan pengabdian ini hingga diakhiri pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2023 sebagai penutupan kegiatan pengabdian masyarakat. Walaupun pengabdian telah berakhir, harapannya kegiatan ini dapat tetap dijalankan agar membawa dampak dan manfaat yang positif bagi masyarakat.

Kegiatan awal yaitu meagendakan pertemuan dengan RT setempat sebagai pembuka kata sebelum meminta data yang diperlukan. Namun ada sedikit kendala itu dapat diatasi dengan menjadwalkan

ulang pertemuan yang akan datang

Pada pelaksanaan kegiatan ini, dapat sambutan dan diterima dengan baik oleh pembakal gudang hirang yang mana tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat setempat.



Gambar 2. Pelaksaaan Pengabdian Masyarakat

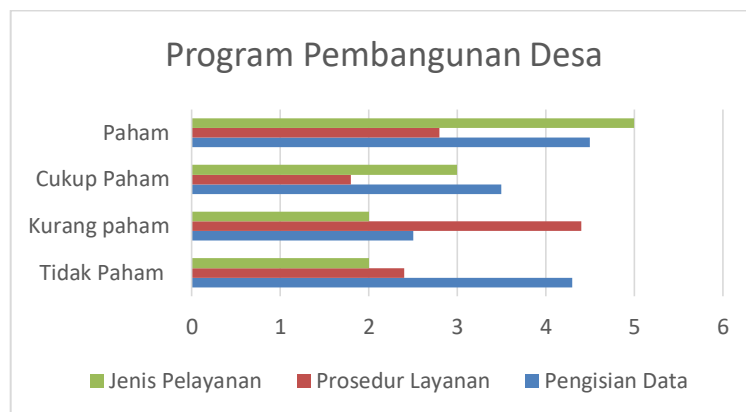


Gambar 3. Pelaksaaan Pengabdian Masyarakat

Melakukan Kunjungan kebeberapa rumah warga, Mengadakan pertemuan dalam rangka silaturahmi antar warga untuk mendiskusikan segala sesuatu permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Melakukan pengerukan got dalam rangka memperlancar sanitasi dilingkungan tempat tinggal dalam rangka menghadapi musim penghujan. Mengikuti Musyawarah Kerja Pengembangan (Muskerbang) Desa Gudang Hirang untuk menentukan skala prioritas usulan pembangunan dimasing-masing wilayah RT Menerima berbagai masukan dan keluh kesah warga serta memberikan solusinya



Gambar 5. Persentase Program Pembangunan Pedesaan



Gambar 6. Persentase Program Pembangunan Desa

SIMPULAN

Kegiatan pembangunan nasional dengan segala ukuran keberhasilan dan dampak positif serta negatifnya, tidak terlepas dari kerja keras dan pengabdian aparat pemerintah desa. Meskipun demikian, masih banyak masalah yang dihadapi masyarakat desa yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, ketidakseimbangan struktural ataupun keterbelakangan pendidikan.

Kenyataan ini telah membuktikan bahwa meskipun desa memiliki dua sumberdaya penting yaitu SDM dan SDA, tetapi kesatuan masyarakat hukum tersebut tidak mampu mengubah potensi yang dimilikinya menjadi sebuah kekuatan guna memenuhi kebutuhannya sendiri.

Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan masyarakat dimana mereka mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya secara bersama. Ada pula yang mengartikan bahwa pembangunan masyarakat desa adalah kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pembangunan sektor sosial ekonomi masyarakat desa perlu diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh organisasi dan partisipasi masyarakat yang terus menerus tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmata, Rahardjo. Manajemen Pemerintahan Daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta; 2011
- Awang, Azam. Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Pustaka Pelajar, Yogyakarta; 2010
- Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta; 2009
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik, C.V Alfabeta, Bandung; 2012
- Moleong, L. J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja RosdaKarya
- Nurcholis, Hanif. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Erlangga, Jakarta; 2011
- Rahayu, Budiana. Pembangunan Perekonomian Nasional melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa, MG, Semarang; 2008
- Syafrudin, ateng dan Na'a, Suprin. Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Moderen Dalam Desain Otonomi Desa. P.T. Alumni, Bandung; 2010
- Syafiie, Inu Kencana. Sistem Pemerintahan Indonesia, P.T Rineka Cipta, Jakarta; 2002
- Soemantri, Bambang Trisantoso. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Fokusmedia, Bandung; 2011
- Thoha, Miftah. Birokrasi Politik di Indonesia, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2010
- Wasistiono, Sadu. Kapita Slekta Manajemen Pemerintahan Daerah, CV. Fokusmedia, Bandung; 2003
- Widjaja, Haw. Otonomi Desa. P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2010